

**PERAN PEMUDA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA  
DI KABUPATEN LUWU-TIMUR**

**IRFAN LAHABU  
P022181026**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2020**

**PERAN PEMUDA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA  
DI KABUPATEN LUWU-TIMUR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

**IRFAN LAHABU**

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

# LEMBAR PENGESAHAN

## TESIS

### PERAN PEMUDA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan diajukan oleh

**IRFAN LAHABU**  
Nomor Pokok P022181026

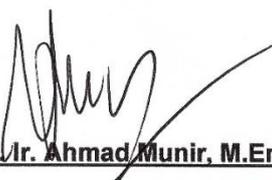
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 2 September 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,

  
**Prof. Dr. Muh. Asdar, SE., M.Si.**  
Ketua

  
**Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.**  
Anggota

Ketua Program Studi  
Perencanaan dan Pengembangan  
Wilayah

  
**Prof. Dr./Ir. Ahmad Munir, M.Eng.**

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin

  
**Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRFAN LAHABU  
Nomor Mahasiswa : P022181026  
Program Studi : Perencanaan & Pengembangan Wilayah  
Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 9 Agustus 2020

Yang menyatakan,



IRFAN LAHABU

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda Sekolah Pascasarjana Univesitas Hasanuddin, Makassar.

Adapun judul proposal penelitian ini adalah: "Peran Pemuda dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Luwu-timur". Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing: Prof. Dr. Muhammad Asdar, S.E., M.Si dan Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibunda Prof. Dr. Dwia Aries Tina NK,.MA, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin, M.Sc, atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Program Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda, Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng.
4. Prof. Dr. Muhammad Asdar, S.E., M.Si sebagai Pembimbing Utama penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.
5. Dr. Muhammad Hasul, S.H., M.H sebagai Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.
6. Orang Tua tercinta, Ayahanda Thalib Lahabu dan Ibunda Aisyah Madeali yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
7. Kepada Kakak Harry Lahabu dan Idha Kurbani, yang Penulis sayangi, atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan Doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis.

8. Rekan-rekan organisasi saya, Himpunan Mahasiswa Islam atas masukkan serta memberikan Doa dan semangat kepada penulis dalam penulisan Tesis ini.
9. Kepada Rekan – rekan mahasiswa Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda angkatan Tahun 2018
10. Kepada Rekan - rekan mahasiswa pascasarjana, dan rekan-rekan kerja saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Makassar, 9 Agustus 2020

IRFAN LAHABU

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup/Batasan Penelitian .....	12
BAB II .....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Teori dan Konsep .....	14
1. Defenisi dan pengertian peran pemuda .....	14
2. Defenisi Kebijakan .....	22
3. Ciri-ciri Kebijakan .....	24
4. Kebijakan Publik .....	26
5. Jenis Jenis Kebijakan .....	28
6. Defenisi Pariwisata .....	30
7. Jenis Jenis Pariwisata .....	31

8. Defenisi Industri Pariwisata .....	33
9. Produk Industri Pariwisata .....	41
10. Pengembangan Industri Pariwisata .....	42
11. Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Industri Pariwisata .....	44
12. Model Pengembangan Industri Pariwisata .....	57
B. Tinjauan Empris .....	64
C. Kerangka Pemikiran .....	66
D. Defenisi Operasional .....	67
BAB III .....	70
METODE PENELITIAN .....	70
A. Pendekatan Penelitian .....	70
B. Fokus Penelitian .....	72
C. Lokasi Penelitian .....	72
D. Subjek, Sumber dan Jenis Data .....	73
1. Subjek Penelitian .....	73
2. Sumber Penelitian .....	75
3. Data Penelitian .....	75
E. Teknik Pengumpulan Data .....	76
F. Teknik Analisis Data .....	78
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	83
BAB IV .....	84
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	84
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	84
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	84
2. Pemerintahan .....	92
3. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Luwu Timur .....	95
4. Demografi .....	111
5. Kesejahteraan Masyarakat .....	113
B. Hasil Penelitian .....	117

1. Peran Pemuda Dalam Pengembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Luwu Timur .....	119
2. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan industri pariwisata dikabupaten luwu timur. ....	124
3. Model Pengembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Luwu-Timur .....	135
4. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman dalam Pengembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Luwu Timur .....	146
B. Pembahasan .....	150
C. Keterbatasan Penelitian .....	154
BAB V .....	155
PENUTUP .....	155
A. Kesimpulan .....	155
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	159
LAMPIRAN.....	164

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perusahaan Kelompok Industri Pariwisata.....	35
Tabel 2. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019.....	87
Tabel 3. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur .....	94
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2019 Kabupaten Luwu Timur .....	111
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur (Jiwa), 2019 .....	112
Tabel 6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2012 – 2019.....	117
Tabel 7. Jumlah Usaha Mikro dan Jumlah seluruh UMKM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 -2019.....	118
Tabel 8. Data Pelaku Industri Pariwisata di Kabupaten Luwu Timur.....	118
Tabel 9. Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2016–2019 .....	132
Tabel 10. Jumlah Akomodasi Hotel/Penginapan Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.....	133

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019.....	4
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	66
Gambar 3. Analisa Model Interaktif.....	81
Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur .....	86
Gambar 5. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Luwu Timur.....	95
Gambar 6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur (juta rupiah), 2015– 2019.....	114
Gambar 7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015–2019.....	134

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format pernyataan bersedia menjadi informan penelitian .....	165
Lampiran 2. Pedoman Wawancara .....	166
Lampiran 3. Transkrip Wawancara.....	171

## ABSTRACT

**IRFAN LAHABU.** *The Role of Young people and Regional Government Policy in Tourism Industry Development at East Luwu Regency* (supervised by Muhammad Asdar and Muhammad Hasrul).

The research aimed at investigating the role of the young people in the tourism industry development and the role of the government policy in the tourism industry development, challenge and opportunity encountered by the young people in the tourism industry development, and tourism industry development strategy.

The research was conducted at East Luwu Regency. The research used the qualitative descriptive method by interviewing the community members of 16 – 30 years old participating the tourism industry. Samples or data resources were taken using the purposive sampling technique and the sample size was determined by the snowball technique. Data were collected using the triangulation (combination), and the data were analyzed using the qualitative method, the research result emphasized the generalization meanings.

The research result indicates that the young people always play their role as young people, however, they tend to play their role personally. From the five models of the tourism industry development, technology has the important role in the tourism industry development. The young people who are engaged in this sector make the technology as an opportunity, whereas the skill represents a challenge which must be encountered by the young people in the tourism industry development.

Key words: Role of young people, government policy, tourism industry.



## ABSTRAK

**IRFAN LAHABU.** *Peran Pemuda dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Luwu-Timur* (dibimbing oleh Muhammad Asdar dan Muhammad Hasrul).

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pemuda dalam pengembangan industri pariwisata, peran kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata, tantangan dan peluang yang dihadapi pemuda dalam pengembangan industri pariwisata, strategi pengembangan industri pariwisata.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu-Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif jenis deskriptif dengan mewawancarai masyarakat yang berumur 16 s. d. 30 tahun yang bergerak pada industri pariwisata. Pengambilan sampel atau sumber data dilakukan secara purposif dan untuk ukuran sampel tersebut ditentukan secara *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan). Data dianalisis secara kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemuda senantiasa tetap menjalankan peranannya sebagai seorang pemuda. Akan tetapi, lebih cenderung ke arah yang sifatnya pribadi. Dari lima model pengembangan pada industri pariwisata, teknologi memiliki peran penting untuk pengembangan industri pariwisata. Pemuda yang bergerak pada sektor ini menjadikan teknologi sebagai peluang, sedangkan pada skill atau keterampilan merupakan tantangan yang harus dihadapi pemuda dalam pengembangan industri pariwisata.

Kata kunci: Peran pemuda, Kebijakan Pemerintah, Industri pariwisata



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pariwisata merupakan suatu industri yang mempunyai peran sebagai *multiplier effect* dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Dampak penting berkembangnya pariwisata salah satunya merupakan adanya perbaikan infrastruktur sosial di suatu wilayah destinasi pariwisata, seperti bandara udara, hotel, akses jalan, transportasi, industri kerajinan, dan industri-industri lainnya yang mempunyai hubungan dengan industri pariwisata yang semuanya itu dibutuhkan dalam menjamin kenyamanan wisatawan menuju dan tinggal selama di destinasi pariwisata. Globalisasi sebagai proses integrasi global menjadi sebuah tantangan sendiri bagi setiap organisasi dan berdampak pula terhadap persaingan yang semakin ketat antar organisasi, baik yang bergerak dibidang profit atau non profit demi mempertahankan eksistensi dan mengejar keuntungan materi (Hasrul, 2012). Arus globalisasi yang terus berjalan berdampak lebih jauh dengan berkembangnya industri pariwisata. Sebagai Organisasi profit, industry pariwisata akan memperluas lapangan kerja dan pada akhirnya akan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah yang menjadi salah satu alasan sehingga industri pariwisata memiliki nilai yang cukup strategis, maka

tidaklah heran jika hampir seluruh Negara didunia mengembangkan potensi sumberdaya pariwisatanya untuk memperoleh devisa Negara.

Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999/2000 pemerintah menuangkan perhatiannya terhadap industri pariwisata, yaitu pada kebudayaan dan kesenian tradisional yang ada di Indonesia sebagai wahana pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara berlanjut sehingga dapat menjadi wadah persahabatan antara bangsa. Didalam GBHN tersebut mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu , interdisipliner, dan partisipatoris, menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan, merupakan program yang akan terus dikembangkan.

Undang-undang No. 10 Tentang Pariwisata yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2009. Undang-undang tersebut menjadi sebuah amanah bagi pemerintah agar harus segera menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) bagi daerah sebagai acuan pokok dalam pembangunan kepariwisataan. Sejalan dengan amanah tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2010 – 2025. Berdasarkan RIPPARNAS, pendekatan pembangunan adalah pendekatan perwilayahan, yaitu

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional merupakan hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Disamping RIPPARNAS, pembangunan kepariwisataan juga harus tetap mempertimbangkan tata ruang nasional yang tertuang dalam Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pengembangan DPN tersebut tidak mungkin dilakukan secara bersamaan melainkan dilakukan secara bertahap dan terfokus selama 15 tahun sehingga pemanfaatan dana pembangunan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta dapat optimal.

Beberapa pariwisata yang kemudian berusaha untuk dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur diantaranya Danau Matano, Danau Towuti, Air terjun Salunua, Air terjun atue, Air terjun matabuntu, Pantai Lemo, Pulau Bulu Poloe, Bukit Agro Tabarano dan Sungai malili. Sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku pemerintah telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki serta tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan (UU RI, 2004). Dalam proses pengembangan objek wisata tersebut tentu saja perlu dipelajari dan diketahui sejauh mana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar diperoleh gambaran yang dapat dijadikan

perbaikan dari pelaksanaan wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019



Sumber: Input Rakyat. (2020). *Laju Pertumbuhan Ekonomi di Luwu Timur Menurun.*

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yang berada di atas rata-rata Provinsi dan Nasional ditorehkan Kabupaten Bantaeng dan Kota Makassar. Kabupaten tertinggi dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 10,75% di peroleh oleh Bantaeng, dan 8,79% di peroleh oleh kota Makassar. Sementara Kabupaten Luwu timur dan Kabupaten Bantaeng berada dibawah paling bawah pada pertumbuhan ekonominya yaitu 1,24% untuk Maros dan Luwu timur berada pada angka 1,17%, berada dibawah rata rata pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi.

Menurut Todaro (2008) Pertumbuhan ekonomi indikator penting dalam mengukur keberhasilan suatu Negara dalam sebuah pembangunan dengan melalui sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu. Oleh karena itu identifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhinya termasuk peran pemuda dan pemerintah pemerintah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

Ada tiga fungsi utama pemerintah dalam mendukung perekonomian yaitu (1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan peradilan; dan (3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum (ma'ruf, 2008) . Untuk menyelenggarakan fungsi serta mekanisme penyelenggaraannya dengan baik pemerintah senantiasa membutuhkan anggaran dalam proses pelaksanaannya yang kemudian dilakukan melalui kebijakan fiskal. Besaran, pertumbuhan, maupun struktur dari anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu Negara merupakan sebuah cerminan dari sebuah kebijakan fiskal.

Ada tiga komponen penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa yaitu: (1) pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun tahun mendatang (2) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, sumberdaya manusia dan peralatan fisik; (3) kemajuan teknologi (Todaro,2005). Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya penyesuaian atau kemajuan teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Ariska, 2019).

Dalam membangun sebuah daerah pada prinsipnya di perlukan kerjasama beberapa stakeholder, baik itu pemerintah maupun masyarakat terkhusus pemudanya. Dengan berkualitasnya sumber daya manusia, diharapkan pembangunan dapat tercapai dalam segala sektor, peranan generasi muda dalam pembangunan daerah begitu penting karena pemegang estafet kepemimpinan daerah di masa yang akan datang berada ditangan para pemudanya, dan menjadi pilar penggerak serta pengawal jalannya pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut sejarah telah mencatat bahwasanya pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan hari ini sehingga maju mundurnya suatu wilayah banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di wilayah tersebut. Namun ketika kita berkaca pada gambar 1 ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Luwu timur dengan sumber daya alam yang memadai, didukung dengan berbagai kekayaan alamnya justru berada pada posisi terbawah dalam laju pertumbuhan ekonominya.

Pemuda diharapkan menjadi sebagai panutan masyarakat sekitar karena mereka merupakan orang orang yang memiliki kemampuan dengan segala potensi serta status sosial yang lebih baik di kalangan

masyarakat. Pemuda senantiasa memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan, apabila kita membaca ulang sejarah kemerdekaan Indonesia, disitu dapat dilihat bahwa peran pemuda sangatlah besar mulai dari proklamasi sampai reformasi semuanya tidak akan terjadi tanpa adanya kiprah para pemuda. Dan pada masa sekarang pemuda diharapkan untuk bisa menunjukkan potensinya dalam pembangunan Indonesia dengan tampil memberikan solusi/masukan terbaik untuk mengatasi segala permasalahan dan juga memberikan harapan baru bagi bangsa ini untuk lebih baik lagi dalam bidang bermasyarakat. Sehingga dari itu peran pemuda menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian yang dilakukan, semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, reformis, futuristik, inovatif, progresif, dan dinamis inilah yang mendasari karakter pemuda seperti yang tertuang dalam pasal 6 UU RI No, 40 tahun 2009. Dalam dinamika berbangsa dan bernegara ditengah arus perubahan sosial yang terus mendera Indonesia pemuda dengan karakteristik seperti demikianlah yang memosisikannya ada dalam posisi penting. Pada kondisi hari ini pula pemuda senantiasa ditantang agar tampil untuk bisa memberikan solusi terbaik untuk mengatasi segala permasalahan dan juga memberikan harapan baru bagi bangsa ini untuk lebih baik lagi dalam pengembangan di segala bidang terkhusus dalam bidang industri pariwisata.

Pemuda merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, ini menjadi salah satu alasan penting tentang peranannya tetapi bukan

karena itu saja, ada beberapa alasan lain yang tak kalah pentingnya yaitu antara lain, *pertama*, pemuda adalah generasi penerus pelanjut estafet kepemimpinan yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. *Kedua*, arah persiapan/pembinaan dan pengembangan generasi muda saat ini akan menjadi penentu kelangsungan sejarah, budaya bangsa, corak warna, serta masa depan suatu bangsa. *Ketiga*, Nilai-nilai Dasar Negara yang menjamin proses kesinambungannya dari sudut semangat kepemudaan yakni sumpah pemuda 1928, proklamasi 1945, Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, untuk mengetahui apa peran pemuda terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Luwu Timur maka perlu dilakukan penelitian tentang peran pemuda dalam proses pengawasan, serta pengembangan terkait kebijakan pemerintah terhadap industri pariwisata yang dilaksanakan secara menyeluruh. Pada sisi sisi lainnya agar pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah perlu mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri terkhusus aspirasi pemuda. Proses yang bersifat *bottom up* ini juga diharapkan mampu meminimalkan konflik pelaku pembangunan baik dalam proses penyusunan kebijakan maupun dalam implementasinya, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi suatu daerah agar senantiasa bisa berkembang dan menunjukkan angka perbaikan salah satu sector yang senantiasa berpengaruh besar terhadap peningkatan

pendapatan atau devisa yaitu sektor pariwisata yang telah terbukti menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melalui beberapa jalur memiliki pengaruh terhadap pariwisata (Yakup, 2019). Pertama untuk memperoleh barang dan modal yang digunakan dalam proses produksi, sektor pariwisata dijadikan sebagai penghasil devisa. Kedua, investasi dibidang infrastruktur merupakan stimulus dari pengembangan pariwisata. Ketiga melalui *direct, indirect, dan induced effect* pengembangan sektor pariwisata mendorong pengembangan sector sector ekonomi lainnya. Keempat, dalam peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan berasal dari kontribusi pariwisata. Kelima, *positive economies of scale* disebabkan oleh pariwisata. Pariwisata juga merupakan factor penting dalam penyebaran *technical knowledge*, mendorong *research and development*, dan akumulasi modal manusia, pariwisata merupakan faktor yang memiliki peranan penting didalamnya.

Peranan pemuda yang senantiasa harus berjalan lurus dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah membuat penulis senantiasa ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Peran Pemuda Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Luwu Timur”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci maka dirasa perlu untuk membatasi dan menentukan rumusan masalah untuk menghindari pembiasan serta pelebaran dalam pembahasan. Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah yang telah dijelaskan, maka didapatkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah peran pemuda dalam pengembangan industri pariwisata di kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata dikabupaten Luwu Timur ?
3. Bagaimanakah strategi pengembangan industri pariwisata dikabupaten Luwu timur ?
4. Bagaimanakah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri pariwisata di kabupaten Luwu timur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah diperolehnya suatu rumusan kebijakan yang melalui peran pemuda dan kebiakan pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata dapat ditingkatkan. Dengan demikian, sumberdaya industri pariwisata yang dimiliki pemerintah kabupaten Luwu Timur dapat digunakan secara optimal bagi

kesejahteraan masyarakat sekitar. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran pemuda dalam pengembangan industri pariwisata di kabupaten Luwu Timur
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata di kabupaten Luwu Timur..
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan industri pariwisata di kabupaten Luwu timur.
4. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri pariwisata di kabupaten Luwu timur

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dan pembaca tentang bagaimana peranan pemuda dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata di kabupaten Luwu Timur.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam upaya pemberdayaan pemuda dan pembangunan daerah melalui peningkatan peran pemuda dalam pengembangan industri pariwisata, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh Kementerian

Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata sebagai acuan dasar yang dapat diterapkan pada daerah lain di Indonesia

3. Memperbanyak literature untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis.
4. Sebagai pelaksana tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

### **E. Ruang Lingkup/Batasan Penelitian**

Penelitian peran pemuda dan kebiakan pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata adalah suatu tema yang cukup luas dimensinya. Kegiatan penelitian ini perlu dibatasi pada beberapa aspek agar dapat dilakukan dengan baik dan dalam rangka mencapai tujuan penelitian seperti dikemukakan. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal tesis ini yaitu :

1. Pemuda dalam penelitian ini diartikan sebagai mereka berkelamin laki- laki atau perempuan, berusia 16-30 tahun, merupakan penduduk di daerah penelitian, serta bekerja dalam bidang industri pariwisata
2. Peran pemuda dalam penelitian ini diartikan sebagai keikutsertaan seorang pemuda dalam memanfaatkan sumberdaya industri pariwisata sebagai salah satu atau satu-satunya mata pencaharian. Terwujudnya peran tersebut bukan karena ada proyek pembangunan pemerintah yang didasarkan pada keikutsertaan

pemuda. Peran yang dimaksudkan di sini lebih difokuskan pada keputusan pemuda secara independen untuk menekuni usaha pada bidang industri pariwisata sebagai mata pencaharian. Dalam proyek atau program pemerintah, peran pemuda yang dimaksudkan berbeda dengan partisipasi pemuda..

3. Industri pariwisata yang dimaksudkan dalam penelitian ini kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
4. Lingkup kawasan penelitian adalah kawasan industri pariwisata dikabupaten luwu timur. Dalam rangka perumusan implikasi peran pemuda pada spektrum kawasan yang lebih luas dilakukan proses deduksi berdasarkan ruang lingkup kawasan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **1. Defenisi dan pengertian peran pemuda**

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia disebut menjalankan suatu peranan (Nurlili, 2019). Diatas telah ditetapkan sebelumnya tetang peran, lebih lanjut kita lihat pendapat lain sebagai peranan normatif.

Tindakan atau kegiatan atau fungsi yang diharapkan dari seseorang atau kelompok bisa diartikan sebagai peran atau peranan. Dalam The Free Dictionary tahun 2006 mengartikan peran sebagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh seseorang dalam lingkungan sosial tertentu.

Strieter dan Blalock (2006) mengungkapkan, supaya seseorang bisa menjalankan perannya secara lebih baik maka perlu melakukan kolaborasi. Kolaborasi adalah upaya organisasi atau manusia mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara efisien melalui upaya individu. Pemuda harus diyakinkan bahwa mereka masing-masing memiliki hak untuk berperan, oleh karena itu pemuda dalam kelompok yang sama harus memiliki visi yang sama dan mengembangkan rasa kepemilikan bersama.

Dalam mempengaruhi hidup seseorang atau masyarakat sekitar, seseorang bisa pula ikut mengambil sebuah keputusan. Ini adalah hak warga negara yang sangat fundamental (mendasar) dan biasanya digunakan sebagai variabel untuk mengukur apakah ada demokrasi dalam suatu kelompok masyarakat (Sufi, 2019).

Ada beberapa definisi tentang pemuda, baik definisi secara fisik ataupun definisi psikis tentang siapa seseorang yang pantas disebut pemuda serta apakah pemuda selalu diposisikan dengan semangat dan usia. *Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)* menyebut pemuda dengan “*young people* atau anak muda” dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut remaja atau “*adolesceneae*”. Sedangkan pada tahun 1985 *International Youth Year* , mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda.

Sementara *Oxford English Dictionary* menerjemahkan 'youth' sebagai pemuda merupakan (*treated as singular or plural*) young people yang diperlakukan sebagai tunggal atau jamak orang muda dan (*the period between childhood and adult age*) yang memiliki pengertian sebagai periode antara masa usia dewasa dan kanak-kanak.

Pemuda merupakan generasi yang dibebani bermacam-macam harapan dipundaknya, paling utama dari generasi yang lain. Hal ini dapat di pahami karena pemuda diharapkan menjadi sebagai generasi penerus yang harus mengisi dan menjadi pelanjut estafet pembangunan secara berkelanjutan (Lubis: 2018)

Warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun didefinisikan sebagai pemuda sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 (Undang undang, 2009)". Sementara Sanit (1985) diacu dalam Rohmad (1998) memandang pemuda sebagai masa yang sentral. Pemuda dalam suatu generasi dapat dibagi menjadi lima masa berdasarkan teori lingkaran hidup (life cycle theory) , yakni (1) anak-anak; (2) remaja; (3) pemuda; (4) dewasa; dan (5) tua. Peranan pemuda dapat seperti seorang remaja dan mungkin pula berperan seperti orang dewasa. Pemuda senantiasa berada pada masa transisi, pada pengembangan kompetensi dan kapabilitas yang dilakukan pemuda pada masa transisi ini penting untuk dipastikan. Generasi tua berpendapat bahwa generasi muda umumnya: (1) tidak disiplin, (2) temperamental, (3) kurang komitmen, (4) tidak tertarik dengan perencanaan jangka panjang, (5) memuaskan diri sendiri, (6) tidak berpengalaman, dan (7) hanya ingin bersenang-senang. Sedangkan generasi muda berpendapat tentang generasi tua yaitu: (1) tidak memberikan wilayah pribadinya, (2) terlalu banyak meminta, (3) kokoh pada prinsip yang dimilikinya, (4) tidak memahami tentang realita saat ini, (5) tidak rela memberi kesempatan kepada yang lain, (6) tidak terlalu tertarik akan aspek-aspek perasaan atau emosi, dan (7) membosankan (Naafs & White, 2012).

Supaya seseorang bisa menjalankan perannya secara lebih baik maka perlu melakukan kolaborasi (Dault, 2007). Kolaborasi adalah upaya

organisasi atau manusia mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara efisien melalui upaya individu. Pemuda harus berkeyakinan bahwa mereka masing-masing dari mereka memiliki hak untuk berperan, oleh sebab itu pemuda dalam sebuah kelompok yang sama harus memiliki visi yang sama pula serta mampu mengembangkan rasa kepemilikan bersama.

Dalam menghadapi ancaman dan menjawab tantangan yang ada pemuda dituntut untuk senantiasa selalu siap. Pada diri seorang pemuda salah satu nilai yang harus selalu ada adalah jiwa kepemimpinan. Dalam menghadapi tantangan global, eksistensi dan resistensi menjadi salah satu syarat soft skill dalam kepemimpinan. Pemupukan jiwa kepemimpinan pemuda menjadi sebuah agenda penting bagi kita semua, yang ditandai dengan keterbukaan arus informasi dan berbagai kesempatan pada era globalisasi yang kadang tidak disertai dengan filter kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai gelombang yang bisa merusak moral dan persatuan bangsa seperti gelombang informasi, paham dan ideologi.

Sebagai kekuatan moral, kontrol sosial serta agen perubahan seorang pemuda harus turut andil dalam proses pembangun bangsa melihat kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Maka dari itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala sektor pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Peran, tanggung jawab, dan hak pemuda senantiasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Undang-undang, 2009) . Hal ini tercantum dalam Pasal 16: Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

a. Kekuatan Moral

Al-Ghazali (Alavi, 2007) menyebutkan bahwa kemampuan diri dalam mengelola dan mengendalikan kecenderungan kecenderungan yang bersifat merusak disebut dengan kekuatan moral. Al Ghazali menuturkan bahwa jiwa manusia senantiasa memiliki kesempurnaannya sendiri sehingga ia selalu terbuka dengan perubahan perubahan yang ada dan perbaikan yang akan membawa seseorang menuju puncak-puncak kemuliaan dan keluhuran budi pekerti.

Dalam bahasa modern itu sendiri kekuatan moral dapat dipahami sebagai komitmen etis dalam arti keyakinan yang kuat pada kebaikan atau apa yang diyakini sebagai kebaikan, lalu bertindak atas dasar keyakinan itu sehingga seorang bersikap benar dan mulia.

b. Kontrol Sosial

Kontrol sosial (*social control*) adalah suatu upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat (Putri, 2015). Menurut Peter Ludwig Berger (1966), upaya yang dilakukan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang di maksud sebagai kontrol sosial. Membangkang yang dimaksud adalah tidak patuhnya seseorang pada segala jenis aturan, baik yang formal ataupun nonformal seperti norma ataupun hukum. Seseorang atau kelompok senantiasa untuk berusaha mengingatkan individu ataupun kelompok lain ketika melakukan pembangkangan baik disertai dengan sanksi ataupun tidak. Peringatan yang dilakukan ini merupakan bentuk dari kontrol sosial.

Sedangkan menurut Joseph S. Roucek (1951) pengendalian sosial merupakan proses baik terencana maupun tidak yang orientasinya mengajak, mendidik, bahkan kadang memaksa semua anggota masyarakat memenuhi seperangkat aturan yang terdiri dari norma atau hukum yang disebut sebagai kaidah sosial yang.

Dari beberapa definisi pengendalian sosial di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan utama kontrol sosial adalah sebuah keteraturan sosial. Konflik dan ketegangan sosial yang tak jarang terjadi di masyarakat dapat diredam oleh upaya-upaya dari kontrol sosial. Dalam proses sosial secara umum, sedikitnya terdapat tiga bentuk konflik yang memerlukan kontrol social :

- 1) Konflik yang terjadi antara ketentuan adat istiadat dengan kepentingan individu
- 2) Konflik yang terjadi antara kepentingan umum dengan kepentingan individu
- 3) Konflik yang terjadi antara golongan yang sengaja menentang tata kelakuan yang berlaku di masyarakat

Dari ketiga bentuk konflik sosial diatas, ini menjadi sebuah alasan tentang perlunya penerapan kontrol sosial di sekitar masyarakat. Dalam upaya menerapkan kontrol sosial, sejumlah agen atau lembaga sosial berdiri untuk berusaha mencitikan kehidupan yang harmonis.

#### c. Agen Perubahan

Teknologi yang semakin canggih, cara berfikir, kompetensi, pasar baru senantiasa terus bergerak dengan cepat di era globalisasi yang mendunia saat ini. Tantangan bahkan peluang senantiasa dapat hadir di dalam sebuah persaingan yang ketat. Agen perubahan merupakan pihak-pihak yang menghendaki perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan suatu kepercayaan sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat (Anwar, 2014). Agent perubahan yang di maksud Havelock dalam rumusannya yaitu merupakan seseorang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau seseorang yang melakukan suatu inovasi yang terencana (Juwita et al., 2019). Seseorang yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang terjadi disebut dengan agen perubahan

(Supriyanto,2016). Griffin dan Pareek memberikan pengertian yang lebih luas bahwa agen perubahan adalah orang professional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus pada masalah, mencari pemecahan yang mungkin, mengatur bantuan, merencanakan tindakan, yang dimaksud untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana (Wibowo, 2006:118).

Seseorang dinamakan sebagai agen perubahan ditandai dengan Bergeraknya atau tersebarluasnya proses perubahan dalam suatu masyarakat ditandai dengan adanya sejumlah orang yang menggerakkan dan menyebarkan proses perubahan tersebut. Sebagai seorang panutan atau teladan bagi sekelompok orang, seorang agen perubahan harus mampu menanamkan karakteristik dalam dirinya. Agen perubahan selalu menanamkan pada dirinya sikap optimis demi terciptanya sebuah perubahan yang diharapkannya. Agen perubahan merupakan para individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab untuk melakukan perubahan atau mengubah perilaku. Menurut Winardi dalam sebuah organisasi sebagai agen-agen perubahan guna menghadapi bahkan mengikuti perubahan, para ahli jiwa dan konsultan sering dimintai bantuan dari mereka.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 (Undang Undang, 2009) tentang Kepemudaan menegaskan mengenai tanggung jawab pemuda sebagai warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Meningkatkan ketahanan kebudayaan nasional;
- g. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

## **2. Defenisi Kebijakan**

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), kebijakan (policy) diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa sangat sederhana atau kompleks, bersifat khusus atau umum, sempit atau luas, jelas atau kabur, terperinci atau longgar, bersifat kuantitatif atau kualitatif, privat atau publik. Kebijakan juga bisa merupakan suatu arah tindakan tertentu, suatu deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (Mega Linarwati, Azis Fathoni, 2016).

Abidin (2012) menjelaskan bahwa pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose*

*to do or not to do*) disebut sebagai kebijakan. Kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan senantiasa mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mengandung makna lain didalamnya tentang kewenangan dari pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah senantiasa memiliki wewenang kepada seluruh masyarakat yang ada. Sementara itu ia juga mengungkapkan bahwa dalam mencapai sebuah tujuan dibutuhkan sebuah kebijakan, program yang yang diproyeksikan berkenaan dengan nilai, tujuan, dan praktiknya.

Menurut Ealau dan Prewit (Lase, 2017) Kebijakan adalah Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari orang yang membuatnya maupun orang yang menaatinya. Kebijakan merupakan prinsip yang mengatur tindakan seseorang yang diarahkan kepada tujuan tertentu (Suharto:2010). Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*) itulah senantiasa diartikan oleh Titmus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip prinsip yang memuat ketetapan mengarahkan cara-cara dalam bertindak yang dilakukan secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu disebut dengan kebijakan.

Pendapat Carl Friedrich (Agustino, 2008) mengartikan kebijakan sebagai berikut:

*Kebijakan merupakan kumpulan tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu*

*wilayah tertentu di mana terdapat beberapa kesulitan (hambatan) serta kesempatan (kemungkinan) yang mana hal tersebut diusulkan dapat berguna dalam hal untuk mencapai tujuan yang dimaksud.*

Defenisi yang diberikan Friedrich terkait kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian dari beberapa maksud dan tujuan yang walaupun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah sulit untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, dan itu menjadi merupakan bagian penting dari definisi kebijakan itu sendiri.

### **3. Ciri-ciri Kebijakan**

William Dunn berpendapat sebagaimana bahwa dalam masalah kebijakan ada empat ciri pokok (Bintari & Pandiangan, 2016) yaitu sebagai berikut :

1. Subjektivitas. Suatu permasalahan didefenisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif yang di timbulkan pada kondisi eksternal. Dari sebuah kebijakan terdapat masalah yang merupakan suatu hasil dari pemikiran yang diberasal pada suatu lingkungan tertentu, masalah tersebut merupakan bagian dari suatu situasi masalah yang digeneralisasikan dari situasi tersebut melalui analisis. Suatu masalah tidak dapat mendefenisikan dirinya sendiri seperti yang telah disinggung diawal sebelum, tetapi masalah senantiasa harus didefenisikan oleh seseorang atau kelompok

yang berkepentingan. Pengalaman pengalaman subjektif individu yang bersangkutan dilibatkan dalam proses ini;

2. Saling ketergantungan. Masalah-masalah kebijakan dalam suatu bidang (misalnya ekonomi) senantiasa mempengaruhi masalah-masalah kebijakan yang lain dalam suatu bidang, (misalnya, pelayanan Industri pariwisata dan pengguran). Masalah masalah kebijakan tidak bisa berdiri sendiri dalam suatu kesatuan, namun merupakan bagian dari seluruh sistem masalah lainnya pada suatu kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen masyarakat berbeda;
3. Sifat buatan. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia berbuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Dari kondisi sosial objektif, masalah kebijakan itu juga bisa di terima sebagaimana defenisi-defenisi yang sah, dan karenanya harus dipertahankan dan diubah secara sosial karena masalah ini telah dipahami.
4. Dinamika. Ada banyak pemecahan dan solusi yang dapat ditawarkan dalam menyelesaikan masalah kebijakan sebagaimana terdapat banyak pengertian terhadap masalah-masalah tersebut. Pada akhirnya cara pandang orang terhadap masalah akan memberikan tawaran solusi dalam memecahkan segala permasalahan yang ada.

#### **4. Kebijakan Publik**

Ruang lingkup yang sangat luas dimiliki oleh kebijakan publik karena mencakup berbagai sektor serta seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan sebagainya. Selain itu jika kita melihat kebijakan publik dari hirarkinya itu dapat bersifat secara kedaerahan atau lokal, maupun nasional seperti peraturan bupati atau walikota, peraturan gubernur, peraturan presiden, peraturan menteri atau keputusan lainnya

Menurut Nugroho (Taufiqurokhman, 2014) ada dua karakteristik dari kebijakan public, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan suatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya merupakan suatu hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya yang jelas yakni seberapa sejauh kemajuan pencapaian tujuan yang sudah ditempuh.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik sesuai dengan pendapat beberapa ahli. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Ada dua kebijakan publik yang ideal, yaitu: (1) Sumber daya bukan merupakan kewirausahaan, tetapi merupakan generasi yang memiliki ide yang produktif secara sosial, kewirausahaan merupakan generasi ide dan bukan eksistensi sumberdaya yang menentukan kemakmuran; (2) Alokasi sumber daya merupakan proses untuk memahami kewirausahaan. Esensinya adalah bahwa alokasi sumberdaya merupakan dampak dari aktivitas wirausaha. Dalam berbagai cara, kebijakan publik bisa mempengaruhi hal. Kewirausahaan masyarakat bisa dirusak dari kebijakan publik yang bersifat regulasi (Kirzner dan Sautet 2006).

Penyusunan kebijakan publik yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Terdorongnya partisipasi masyarakat serta membuat para penyusun kebijakan publik menjadi bertanggung jawab (accountable) kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik merupakan sebuah dorongan atas keterbukaan (transparansi) atas berbagai proses pengambilan keputusan. Sebuah kondisi minimum bagi partisipasi masyarakat dan merupakan awal dari terwujudnya akuntabilitas itulah yang disebut sebagai transparansi. Prinsip Dari suatu kebijakan publik, masyarakat akan memperoleh manfaat dalam sebuah pengambilan keputusan, masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari suatu kebijakan publik harus turut serta di dalam proses pengambilan keputusan dengan prinsip partisipatif. Artinya bahwa masyarakat menikmati hasil (produk) atas keikutsertaannya dalam proses

kebijakan publik yang berfaedah. Dalam penyusunan kebijakan public prinsip partisipatif senantiasa membantu terselenggaranya proses perumusan kebijakan memudahkan penentuan prioritas (transparansi) dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Kapasitas para aparat publik dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas agar dapat membuktikan bahwa setiap tindakan yang lakukan ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap masyarakat terkait dengan indikator target dan kinerja yang jelas.

## **5. Jenis Jenis Kebijakan**

Pemahaman yang lebih baik terhadap kenyataan kebijakan publik sebagaimana tindakan yang mengarah pada kepada tujuan, kebijakan tersebut dapat di uraikan kedalam beberapa kategori sebagaimana diisyaratkan oleh Sholichin Abdul Wahab yang dikutip Suharno (2010), yaitu :

1. Tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistim politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu ini lah yang disibet dengan tuntutan kebijakan (*policy demand*). Berbagai bervariasi dalam tuntutan ini, mulai dari desakan umum, agar pemerintah melakukan sesuatu hal hingga usulan untuk mengambil tindakan yang jelas dalam masyarakat terhadap suatu masalah yang terjadi;

2. Keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan public disebut dengan keputusan kebijakan (*policy decisions*). Dalam hal ini, termasuk di dalamnya ketetapan ataupun keputusan untuk menciptakan suatu ketentuan dasar, serta membuat penafsiran terhadap aturan yang berlaku semisal undang undang.
3. Pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu disebut dengan pernyataan kebijakan (*policy statements*). Pernyataan ini semisal keputusan peradilan, ketetapan MPR, keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan tujuan pemerintah, hasrat dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut;
4. Wujud dari kebijakan publik yang paling tidak dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang nyata dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan disebut dengan keluaran kebijakan (*policy outputs*). Secara singkat apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah menyangkut keluaran kebijakan.
5. Akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah masalah

tertentu yang ada dalam masyarakat merupakan arti dari hasil akhir kebijakan (policy outcomes).

## **6. Defenisi Pariwisata**

Menurut Soekadijo istilah pariwisata pertamakali digunakan oleh presiden Soekarno dalam suatu percakapan dalam suatu padanan dari istilah asing *tourism* (Tali, 2017). Kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain didefenisikan sebagai pariwisata (Meyers, 2009).

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula dilakukan orang untuk sementara waktu dengan suatu perencanaan dan dengan maksud semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam bukan untuk berusaha mencari nafkah di tempat yang dikunjungi (Richardson and fluker, 2004). Sementara Sinaga (2010) berpendapat bahwa sebuah perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata disebut dengan pariwisata.

Menurut *World Tourism Organization* menyatakan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Menurut

Undang-undang Kepariwisata Nomor 10 (Pemerintah Indonesia, 2009) terdapat sejumlah definisi yang terkait dengan pariwisata, yaitu:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pariwisata merupakan bentuk kegiatan manusia yang berpangkal tolak pada perjalanan maka pariwisata menimbulkan berbagai kebutuhan fisik seperti kebutuhan akan sarana transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, hiburan dan lain sebagainya.

## **7. Jenis Jenis Pariwisata**

Timbulnya bermacam-macam jenis wisata dengan potensi yang dimiliki atau warisan nenek moyang pada suatu daerah yang dikembangkan sebagai kegiatan yang lama kelamaan mempunyai cirinya

tersendiri. Jenis wisata terbagi menjadi tujuh jenis menurut Ali Hasan (2015) berdasarkan tujuan seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan wisata yaitu sebagai berikut :

a. Wisata Kuliner

Pengalaman menjadi salah satu dorongan yang menarik dalam sebuah wisata kuliner bukan hanya semata mata untuk mengenyangkan dan memanjakan perut wisatawan dengan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata..

b. Wisata Olahraga

Kegiatan dalam wisata senantiasa dapat dipadukan dengan kegiatan olahraga yang aktif mengharuskan wisatawan melakukan gerakan olah tubuh secara langsung inilah yang disebut dengan kegiatan wisata secara aktif. Sedangkan kegiatan yang lain disebut kegiatan pasif dimana wisatawan menjadi penikmat dan menjadi pecinta olahraga saja tidak melakukan gerak olah tubuh.

c. Wisata komersial

Pameran dagang, pameran industri, dan sebagainya masuk dalam kategori wisata komersil yang menjadi salah satu alasan wisatawan melakukan perjalanan untuk mengunjungi suatu tempat.

d. Wisata industri

Tempat industri menjadi pusat tempat kunjungan dari wisata ini. Biasanya perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar,

mahasiswa, ataupun orang-orang awam ke suatu tempat dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian.

e. Wisata Bulan Madu

Wisata ini biasanya melibatkan pengantin baru sebagai sarannya biasanya wisatawan difasilitasi fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

f. Wisata Cagar Alam

Cagar alam seperti hutan, taman lindung, hutan daerah biasanya dijadikan sebagai wadah utama dalam pelaksanaan wisata ini. Biasanya wisata ini diselenggarakan oleh biro perjalanan ataupun agen yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat tempat tersebut.

Bisa saja jenis pariwisata ini bias berkembang dan bertambah, tergantung pada perkembangan kondisi dan situasi di dunia kepariwisataan pada suatu daerah. Tergantung bagaimana kreativitas para ahli professional yang bergerak pada sektor industri pariwisata. Semakin bertambahnya bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan bagi kemajuan industri pariwisata tergantung dari kreativitas dan gagasan yang dimiliki oleh para pengembang (Pratiwi, 2015).

## **8. Defenisi Industri Pariwisata**

Defenisi industri pariwisata seperti menurut Undang-undang Pariwisata No 20 Tahun 2009 merupakan kumpulan usaha pariwisata

yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pada negara-negara sedang berkembang untuk memberikan daya tarik agar pariwisata dapat dianggap sebagai sesuatu yang berarti bagi perekonomian suatu Negara digunakanlah istilah industri pariwisata (Tourism Industri). Gambaran pariwisata sebagai suatu industri diberikan hanya untuk menggambarkan pariwisata secara konkret, dengan demikian dapat memberikan pengertian yang lebih jelas (Yoeti, 2008). Industri pariwisata senantiasa berbeda dengan industri manufaktur. Berbeda dengan industri semen, garmen, atau industri sepatu, industri pariwisata tidak berdiri sendiri. Industri pariwisata sering juga disebut sebagai *smokeless industry* atau industri tanpa cerobong asap karena bersifat *intangible* atau tidak berwujud.

Menurut Freyer dalam Damanik dan Weber mengatakan semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata disebut dengan industri pariwisata (Suwena, 2017). Ada dua golongan utama pada pengelompokan industry pariwisata, yaitu:

1. Pelaku langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Hotel, biro perjalanan, restoran, atraksi hiburan, pusat informasi wisata dll masuk dalam kategori ini. Hotel menjadi pihak paling utama yang bersentuhan langsung dengan wisatawan secara faktual, kemudian diikuti oleh biro perjalanan.

2. Pelaku tidak langsung, yakni usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembar panduan wisata, penjual roti, dan sebagainya.

Seperti dijelaskan oleh Yoeti yang berusaha untuk memberikan batasan pariwisata sebagai industri bahwa pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung pada suatu tempat diberikan secara langsung oleh kelompok perusahaan (Suwena, 2017). Wisatawan tidak akan memperoleh keamanan (*security*), kepuasan (*satisfaction*) dan kenyamanan (*comfortable*) dalam mencari kesenangan yang diinginkan tanpa bantuan dari kelompok perusahaan ini. Perusahaan-perusahaan dimaksudkan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perusahaan Kelompok Industri Pariwisata

No.	Jenis Perusahaan	Fungsi dan Tugasnya
1	<i>Tour Operator/Wholesaler</i>	Memberi informasi/advis/paket wisata
2	Maskapai Penerbangan	Menyediakan <i>seats</i> dan <i>baggages services</i>
3	Angkutan Pariwisata	Melayani <i>transfer service</i> dari dan ke <i>airport</i>
4	Akomodasi Hotel, Motel, <i>Inn</i> , dll	Menyediakan kamar, <i>laundry</i> , dll
5	Restoran dan sejenisnya	Menyediakan makanan dan minuman
6	<i>Impresariat, Amusement</i> , dll	Menyediakan atraksi wisata dan hiburan
7	<i>Lokal Tour Operator</i>	Menyelenggarakan <i>city-sighseeing &amp; tours</i>
8	<i>Shopping Center/ Mall</i> , dll.	Menyediakan cenderamata dan oleh-oleh
9	Bank/ <i>Money Charger</i>	Melayani penukaran valuta asing
10	<i>Retail Service</i>	Bermacam-macam keperluan wisatawan

Sumber: Suwena (2017)

Kumpulan dari pada berbagai macam sektor usaha, yang secara bersama sama menghasilkan produk produk ataupun jasa/pelayanan atau service yang nantinya baik secara langsung ataupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama perjalanannya disebut sebagai industry pariwisata menurut R.S Darmaji (dalam Yoeti, 1996: 153)".

Rumusan yang diberikan oleh Bern University tentang industri pariwisata adalah sebagai berikut: "*Tourism enterprises are all business entites whiech, by combining various various means of production, provide goods and service of a specially tourist nature*" yang artinya : industri pariwisata adalah seluruh kegiatan bisnis hasil produksi, keuntungan dari barang dan jasa pembawaan yang khusus pada wisatawan Hunziker (dalam Yoeti, 1996 : 154).

Berneker (dalam Yoeti, 1996 : 154) memberikan rumusan atau batasan tentang industri pariwisata yang hamper sama dengan batasan yang dikemukakan oleh Hunzieker yaitusebagai berikut : (*tourism industri are economic entities for the provision of service to satisfy the need for trabel or other beed related to it and further make a destination between (mainlu tose involved into the promotion and advertising for tourism) and enterprises estabilishing relation between tourist object, i.e travel agent, tour operator and other intermedieteries*) yang artinya : (industri pariwisata merupakan identisas ekonomi dalam suatu perjalanan atau kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan perjalanan tersebut dan selanjutnya

memberikan batasan antara “ subject oriented” (bidang usaha yang terlibat dalam iklan serta promosi tentang kepariwisataan) dan perusahaan lain yang berhubungan antara wisatawan dan objek wisata travel agen, tour operator, dan perantara lainnya).

G.A Schmool dalam bukunya yang berjudul tourism promotion (dalam Yoeti, 1996 : 1954) memberi batasan terhadap industri pariwisata sebagai berikut : “Tourism is a highly decentralized industri consisiting of enterprises different in size, type organition, function, location, range of service provide, and method use to market and sell them”, yang artinya Industri pariwisata adalah pemusatan industri yang terdiri dari perusahaan–perusahaan yang berbeda, baik dalam ukuran, jenis organisasi, fungsi, lokasi, pemberian pelayanan, dan cara yang digunakan dalam memasarkannya).

Dari British Travel Assosiation (BTA) industry pariwisata dirumuskan dengan terperinci oleh L.J Lickorish dan A.C, Kershaw (Yoeti, 1996: 156) sebagai berikut :

- a. Industri pariwisata adalah keseluruhan para penjual produk wisata yang mana bersama-sama memberikan kepuasan kepada wisatawan
- b. Industri pokok, melayani dalam hal transpotasi, penginapan dan makanan serta persiapan perjalanan (travel Agen, Tour Operator dan lainnya)

- c. Industri tambahan, industri pariwisata yang menyediakan souvenir serta kebutuhan lainnya, hiburan, asuransi, pelayanan bank dan lainnya. Juga merupakan kelompok penyedia pada industri pokok pariwisata, keperluan masyarakat, dan industri yang menangani promosi pariwisata lainnya.

Krippendorf (Yoeti, 1996: 156) memberikan batasan terakhir yang disampaikan disini adalah sebagai berikut: Industri pariwisata merupakan wujud dari keseluruhan kegiatan bisnis yang menyediakan pelayanan dan barang-barang berbagai macam jenis kebutuhan yang tepat bagi kepuasan wisatawan dan melakukan hubungan dalam perjalanan biasa dari ke semua kegiatan mereka. Itu tidak berhubungan apapun dengan industri yang menyediakan pelayanan yang berlebihan, lebih banyak atau hanya sesekali saja kepada wisatawan.

Ada tujuh komponen besar tentang system pariwisata yang berusaha dijelaskan oleh Leiper (Pitana, 2009:63), dimana komponen tersebut merupakan sektor utama dalam industri kepariwisataan yang membutuhkan keterpaduan, ketergantungan, dan keterkaitan, yaitu:

- a. Sektor pemasaran (The Marketing Sector)

Dalam Industri pariwisata sektor ini senantiasa berkaitan dengan semua unit pemasaran, semisal kantor pemasaran maskapai penerbangan (air lines), kantor biro perjalanan dengan jaringan

cabangnya, kantor promosi atau periklanan pada daerah tujuan wisata tertentu, dan sebagainya.

b. Sektor perhubungan (The Carrier Sector)

Hal ini berkaitan dengan semua macam atau bentuk transportasi puumum, khususnya yang beroperasi sepanjang jalur singgah yang menghubungkan tempat tujuan wisatawan (tourist destination region) dengan asal wisatawan (traveller generating region). Semisal perusahaan bus (coachline), penerbangan (airlines), penyewaan mobil, penyewanan kapal laut, kereta api dan sebagainya.

c. Sektor akomodasi (The Accommodation Sector)

Dalam industry pariwisata sector ini berperan sebagai penyedia jasa penginapan/tempat tinggal sementara atau pelayanan yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti food and beverage atau penyediaan makanan dan minuman. Sektor ini biasanya berada pada daerah tujuan wisata dan tempat singgah bagi para wisatawan.

d. Sektor daya tarik/atraksi wisata (The Attraction Sector)

Sektor ini berkaitan dengan penyedia jasa daya tarik atau atraksi wisata bagi wisatawan. Lokasi utamanya biasa berada pada daerah tujuan wisata tetapi dalam beberapa kasus juga berada pada daerah tempat singgah wisatawan. Misalnya tempat hiburan (entertainment), taman budaya, tempat dan daya tarik wisata alam, event olah raga dan budaya, peninggalan budaya, dan sebagainya. Kompensasi biasanya diberikan bagi suatu daerah tujuan wisata yang tidak

memiliki sumber daya atau daya tarik wisata alam yang menarik untuk memaksimalkan daya tarik atraksi wisata lain.

e. Sektor tour operator (The Tour Operator Sector)

Sektor ini mencakup perusahaan penyedia paket wisata dan penyelenggara. Perusahaan ini membuat paket perjalanan sekaligus mendesain seperti apa paket wisata yang kemudian akan ditawarkan dengan memilih dua atau lebih komponen (baik paket, tempat, atau atraksi wisata) lalu memasarkannya kepada wisatawan sebagai sebuah bagian dalam tingkat harga tertentu, biasanya biaya dan harga masing-masing komponen dalam paketnya itu disembunyikan.

f. Sektor pendukung/ rupa-rupa (The Miscellaneous Sector)

Dalam industry pariwisata sektor ini senantiasa mencakup pendukung diselenggarakannya kegiatan wisata baik di negara/ tempat tujuan wisata, sepanjang rute transit, maupun di negara/tempat asal wisatawan. Misalnya restoran, café, toko oleh-oleh (souvenir), asuransi perjalanan wisata, travel cek dan lain sebagainya.

g. Sektor pengkoordinasi/ regulator (The Coordinating Sector)

Sektor ini biasanya dipegang oleh pemerintah daerah ataupun pusat selaku regulator dan asosiasi lainnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik di tingkat internasional, regional, maupun local. Sektor ini biasanya melakukan fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan untuk sebagai sistem

koordinasi antara seluruh sektor dalam industri pariwisata. Misalnya, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata dan lainnya yang berkaitan dengan tugas regulator yang ada pada daerah wisata.

## **9. Produk Industri Pariwisata**

Produk dalam ilmu ekonomi pada umumnya dimaksud dengan sesuatu yang dihasilkan melalui proses produksi. Suatu barang (produk) yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan guna memenuhi kebutuhan manusia merupakan penekanan yang diberikan untuk pengertian tersebut. Medlik dan Middleton (dalam Yoeti, 1996 : 165) mengemukakan bahwa produk pariwisata adalah semua jasa-jasa atau servis yang dibutuhkan wisatawan sejak ia berangkat meninggalkan rumah sampai ia kembali ke tempat tinggalnya. Berikut disebutkan tentang jasa jasa ataupun produk tersebut, yaitu :

- a. Biro Perjalanan Umum. Memberikan informasi tentang objek wisata yang berada di suatu daerah, mengurus dokumen-dokumen perjalanan, maupun mengatur rencana perjalanan kegiatan-kegiatan dari perjalanan lainnya.
- b. Transportasi. Pelayanan yang diberikan kepada para wisatawan berupa jasa pengangkutan atau alat transportasi yang membawa ke daerah tujuan yang diinginkan atau telah dipilihnya.
- c. Jasa-jasa akomodasi berupa pelayanan seperti perhotelan, bar, restoran, coffeshop dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

- d. Jasa-jasa transportasi lokal (bus, taksi, angkutan umum, dan coach) dalam melakukan jalan jalan pada daerah destinasi, pada objek wisata dan atraksi wisata lainnya.
- e. Objek wisata atau atraksi wisata yang terdapat di daerah tujuan wisata merupakan daya tarik agar orang berkenan berkunjung pada suatu wilayah.
- f. Jasa-jasa souvenir shop dan shopping center, tempat wisatawan melakukan proses berbelanja atau membeli oleh oleh yang akan dibawa pulang.
- g. Perusahaan pendukung, seperti tempat penukaran uang (mata asing), bank, penjual kartu pos, perangko dan lain sebagainya.

## **10. Pengembangan Industri Pariwisata**

Perencanaan dan pengembangan industri pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan pengembangan industri pariwisata bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter regional.

Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling

menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang (Fandeli,1995). Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Pengembangan kepariwisataan saat ini tidak hanya untuk menambah devisa negara maupun pendapatan pemerintah daerah. Akan tetapi juga diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha disamping memberikan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi pengangguran. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tujuan wisata tersebut melalui keuntungan secara ekonomi, dengan cara mengembangkan fasilitas yang mendukung dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Pengembangan daerah wisata hendaknya memperlihatkan tingkatnya budaya, sejarah dan ekonomi dari tujuan wisata.

Pariwisata bukan saja sebagai sumber devisa, tetapi juga merupakan faktor dalam menentukan lokasi industri dalam perkembangan daerah-daerah yang miskin sumber-sumber alam sehingga perkembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk memajukan ekonomi di daerah-daerah yang kurang berkembang tersebut sebagai akibat kurangnya sumber-sumber alam (Yoeti, 1997). Gunn (1988), mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi yang harus dilihat

dari dua sisi yakni sisi permintaan (demand side) dan sisi pasokan (supply side). Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa keberhasilan dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah sangat tergantung kepada kemampuan perencana dalam mengintegrasikan kedua sisi tersebut secara berimbang ke dalam sebuah rencana pengembangan pariwisata.

### **11. Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Industri Pariwisata**

Sektor pariwisata merupakan komoditas penting dan strategis bagi perolehan devisa suatu Negara. Oleh karena itu, persaingan untuk mendatangkan wisatawan ke setiap daerah menjadi semakin tinggi. Hal ini terlihat dengan kampanye kampanye kebudayaan yang dilakukan yaitu promosi industri pariwisata yang menjanjikan berbagai hadiah, keindahan, kemudahan, dan pelayanan yang baik dan cepat menjadi informasi peting setiap saat mengisi media massa.

Pesatnya perkembangan pariwisata tentunya memberikan dampak positif dan negative terhadap daerah sekitarnya. Menurut Nurman (2015:207), pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah menyangkut urusan pilihan dalam hal ini sektor pariwisata, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam

pengembangan pariwisata dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata harus memperhatikan komponen-komponen tertentu yang bermanfaat bagi keberhasilan pengembangan pariwisata. Menurut Yoeti (2016:16), dalam pariwisata terdapat tiga unsur inti yang harus dimiliki yaitu:

a. Aksesibilitas

Termasuk dalam kelompok ini adalah bandara, pelabuhan, terminal, jalan raya, jembatan, telekomunikasi, atau transportasi, pembangkit tenaga listrik dan persediaan air bersih. Pada dasarnya semua prasarana yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, tanpa itu tidak mungkin pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.

b. Fasilitas

Yaitu semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, toko souvenir, bank, dan money changer.

c. Atraksi

Yaitu semua objek dan atraksi yang tersedia sebagai daya tarik, termasuk *natural resources*, *cultural resources*, *theme parks*, *sport activities* dan *events*. Atraksi harus memenuhi tiga syarat yaitu apa

yang dapat dilihat (*something to see*); apa yang dapat dilakukan (*something to do*); dan apa yang dapat dibeli (*something to buy*).

Varesci (2001:20) menjelaskan bahwa selama ini pembangunan pariwisata dilakukan dengan mengesampingkan penduduk setempat. Masyarakat hanya menjadi penonton dari proyek-proyek pariwisata yang dibangun. Cara ini untuk jangka panjang berbahaya, karena dapat menciptakan kecemburuan sosial. Mengikutsertakan penduduk setempat dalam pelaksanaan proyek dan bahkan dalam pengelolaan justru member manfaat dan keuntungan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Menurut Nurman (2015:207), pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah menyangkut urusan pilihan dalam hal ini sektor pariwisata, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Di tahun 2018 dalam rangka pengembangan sektor pariwisata pemerintah bersama dengan Bank Indonesia beserta Otoritas Jasa Keuangan merumuskan beberapa strategi untuk memperkuat koordinasi

sekaligus mensinergikan kebijakan antar pemangku kepentingan diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas dan akses destinasi pariwisata
- b. Penguatan data dan informasi
- c. Peningkatan akses pembiayaan.
- d. Intensifikasi layanan sistem pembayaran digital
- e. Penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.
- f. Penguatan akses/konektivitas darat dan udara
- g. Pengembangan atraksi yang terintegrasi
- h. Peningkatan amenities
- i. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemudian, sebagai salah satu wujud pengaturan bidang kepariwisataan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Aturan inilah yang menjadi acuan bagi pemerintah dalam pengembangan industri pariwisata.

Pada pasal 15 Undang-Undang No 10 Tahun 2009, pemerintah mengatur bahwa untuk menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha

pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Selain itu, UU ini juga mengatur bagaimana pemerintah bertindak kepada para pelaku usaha pariwisata, seperti pada pasal 17, dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar. Terakhir, pada bab VIII, UU ini juga mengatur hak, kewajiban, dan larangan tentang usaha pariwisata. Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga mengatur apa saja hak, kewajiban dan larangan wisatawan, masyarakat lokal, dan yang penting para pelaku usaha/industri pariwisata, agar kedepannya Indonesia semakin berkembang dalam sektor pariwisata, mengingat industri pariwisata sangat erat dengan peningkatan kualitas pariwisatanya. Otonomi daerah yang merupakan titik tolak bagi daerah dalam mengembangkan dan mengelola aset-aset atau potensi sumberdaya yang dimilikinya bagi kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Untuk itu, daerah perlu mencermati sektor-sektor strategis yang memiliki potensi kuat dalam menopang pembangunan di daerahnya. Industri pariwisata yang ingin bertahan lama, tidak dapat

hanya mengandalkan pada pembangunan fisik semata seperti infrastruktur aksesibilitas seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, melainkan secara terpadu (*integrated*) dilakukan bersama dengan pengembangan kualitas individu pelaku kepariwisataan dan respon positif masyarakat disekitarnya. Pariwisata sebagai salah satu kegiatan pembangunan diupayakan dapat sejalan dengan konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan perlu menerapkan kaidah-kaidah :

- a. Pengembangan pariwisata berorientasi jangka panjang dan menyeluruh (*holistic*) tidak hanya memanfaatkan tetapi sekaligus melestarikan obyek dan daya tarik wisata yang memberikan manfaat secara adil bagi semua.
- b. Pembangunan pariwisata yang sesuai dengan karakter wilayah, kondisi lingkungan, kontak sosial dan dinamika budaya.
- c. Penciptaan keselarasan sinergis antara kebutuhan wisatawan dan penyediaan oleh masyarakat local, yang memunculkan hubungan timbal balik dan saling menghargai, nilai, adat istiadat, kebiasaan, warisan budaya.
- d. Pemanfaatan sumberdaya pariwisata yang memperhitungkan kemampuan lestariannya yang pengelolaannya secara *eco-efficiency (Reduce, Reuse dan Recycle)* sehingga mencapai *eco-effectivity (Redistribute, Reactual)*

- e. Pengelolaan kegiatan pariwisata yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi dari kedua sisi permintaan (pasar) dan penawaran (produk).

Nampak jelas bahwa pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Pendit (2003 : 25), menyebutkan bahwa terdapat sepuluh unsur pokok dalam industri pariwisata. Pengembangan Industri pariwisata di suatu negara atau daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memiliki unsur – unsur berikut ini :

- a. Politik dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat

Unsur yang pertama ini terkait dengan peran pemerintah dalam rangka mengelola potensi pariwisata di daerahnya. Melalui Politik dan Kebijakan yang dikeluarkannya, pemerintah dapat mempengaruhi keberlangsungan industri pariwisata di daerahnya. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pariwisata di daerahnya atau justru menenggelamkan potensi pariwisata yang ada melalui kebijakannya.

- b. Perasaan Ingin Tahu

Pada awalnya hakikat paling utama yang melahirkan pariwisata adalah perasaan manusia yang terdalam, yang seba ingin tahu segala sesuatu selama hidup di dunia. Manusia ingin tahu segala

sesuatu di dalam dan diluar lingkungannya, mereka ingin tahu tentang kebudayaan di negara asing, cara hidup dan adat istiadat negeri antah berantah, udara dan hawa udara yang berbeda beda di berbagai negeri, keindahan dan keajaiban alam dengan bukit, gunung, lembah serta pantainya, dan berbagai hal yang tidak ada dalam lingkungan sendiri.

c. Sifat Ramah Tamah

Sifat ramah tamah rakyat Indonesia ini merupakan salah satu “modal potensial” yang besar dalam bidang pariwisata, disamping keindahan alam dan atraksi yang menarik, sifat ramah tamah ini juga merupakan investasi tak nyata dalam arti kata sesungguhnya pada industri pariwisata karena merupakan daya tarik sendiri.

d. Jarak dan Waktu (Aksesibilitas)

Yang harus diperhatikan oleh stakeholder yang berkompeten didalam indsutri pariwisata dewasa ini adalah tentang waktu dan jarak tempuh yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk mencapai objek wisata.

e. Atraksi

Dalam dunia kepariwisataan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat disebut atraksi, atau umumnya disebut objek wisata, baik yang biasa berlangsung tiap

harinya serta yang khusus diadakan pada waktu tertentu di Indonesia sangat banyak.

f. Akomodasi

Akomodasi merupakan rumah sementara bagi sang wisatawan sejauh atau sepanjang perjalanannya membutuhkan serta mengharapkan kenyamanan, keenakan, pelayanan yang baik, kebersihan sanitasi yang menjamin kesehatan, serta hal-hal kebutuhan hidup sehari hari yang layak dalam pergaulan dunia Internasional

g. Pengangkutan (Courier)

Faktor pengangkutan dalam dunia pariwisata membutuhkan syarat tertentu, antara lain jalan yang baik, lalu lintas lancar, alat angkutan yang cepat disertai dengan syarat secukupnya dalam bahasa asing yang umum dipergunakan oleh pergaulan dunia Internasional.

h. Harga-Harga

Di tempat atau di negara mana harga barang atau ongkos perjalan yang lebih murah dan lebih baik, sudah tentu wisatawan akan memilihnya.

i. Publisitas dan Promosi

Publisitas dan promosi yang dimaksud disini adalah propaganda kepariwisataan dengan didasarkan atas rencana atau program secara teratur dan berkelanjutan baik. Ke dalam Publisitas dan

promosi ini ditujukan pada masyarakat dalam negeri sendiri dengan maksud dan tujuan menggugah pandangan masyarakat agar mempunyai kesadaran akan kegunaan pariwisata baginya, sehingga Industri Pariwisata di negeri ini memperoleh dukungannya

Ke luar, publisitas dan promosi ini ditujukan pada dunia luar dimana kampanye penerangan benar-benar mengandung berbagai fasilitasfasilitas dan atraksi yang unik dan menarik terhadap wisatawan. Dalam hal ini Indonesi hendaknya dapat mengedepankan fasilitas yang unik dan memenuhi standar dunia industri pariwisata serta menyajikan atraksi menarik yang beda dari tempat lain.

j. Kesempatan Berbelanja

Kesempatan berbelanja atau lazim pula dikatakan shopping adalah kesempatan untuk membeli barang, oleh-oleh, atau souvenir untuk dibawa pulang ke rumah atau ke negaranya

Sondakh (2010 : 43), menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat tiga faktor yang penting dalam pengembangan pariwisata, yaitu :

- 1) Perbaikan Infrastruktur
- 2) Perbaikan Promosi
- 3) Perbaikan Keamanan

Dalam rangka pengembangan pariwisata ini, maka dilakukan pendekatan terhadap organisasi pariwisata yang ada (Pemerintah dan

Swasta), serta pihak lain yang diharapkan mampu mendukung tumbuh kembangnya pariwisata seperti pemuda misalnya. Berikut merupakan tiga aktor utama yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata menurut Pitana dan Gayatri (2005 : 95) :

1) Masyarakat

Yaitu masyarakat umum yang tinggal di sekitar obyek wisata, yang juga merupakan pemilik sah dari berbagai sumberdaya modal pariwisata, seperti kebudayaan, tokoh masyarakat, intelektual, LSM serta media massa.

2) Swasta

Yaitu seperti asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata.

3) Pemerintah

Yaitu mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan wewenang yang dimilikinya untuk mengembangkan pariwisata diwilayahnya, yang mencakup dari seluruh penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (Fasilitator), kerjasama yang sinergis dengan berbagai stakeholder pariwisata (Dinamisator), serta menjadi pendorong

bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (Motivator).

Pendit (2003 : 39) menyebutkan dua faktor penting terkait peran pemerintah (politik) suatu negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, yaitu yang secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan industri pariwisata tersebut. Pertama yang secara langsung mempengaruhi adalah sikap pemerintah terhadap kunjungan wisatawan, kedua secara tidak langsung yaitu adanya situasi dan kondisi yang stabil dalam perkembangan politik ekonomi serta keamanan dalam negara atau daerah itu sendiri.

Selanjutnya, masih dalam buku yang ditulis oleh Pendit (2003) menjelaskan bahwa peran pemerintah dan rakyat adalah penting dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di negara atau daerahnya. Artinya, pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan peningkatan sector pariwisata, lalu rakyat harus selalu mendukung berbagai kebijakan terkait pariwisata yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sinergitas antara pemerintah dan rakyat inilah yang nantinya akan menghasilkan output berupa perkembangan pariwisata yang berkelanjutan, bertanggung jawab, efektif dan efisien.

Peran pemerintah Indonesia dalam rangka peningkatan sektor pariwisata telah dirumuskan sejak zaman orde baru, yaitu pada Ketetapan MPR tahun 1978 dalam Pendit (2003 : 41) yang berisi sebagai berikut :

- a. Kepariwisata perlu ditingkatkan dan diperluas untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional.
- b. Untuk itu perlu diambil langkah langkah pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijakan terpadu, antara lain di bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu dan kelancaran pelayanan.
- c. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dalam negeri lebih ditujukan pada pengenalan budaya bangsa dan tanah air

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Luwu Timur, dibutuhkan kerjasama dan sinergitas yang baik antara berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah pihak pemerintah, swasta serta masyarakat. Dikarenakan terdapat banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kulon Progo, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai pihak pengelola dari lembaga formal harus mampu menjadi fasilitator dan bersinergi diantara berbagai pihak lainnya dalam usaha pengembangan pariwisata di Kabupaten Luwu Timur, dengan kata lain, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga harus mampu untuk menerapkan prinsip *Good Governance* baik di dalam, maupun di luar lembaga.

## **12. Model Pengembangan Industri Pariwisata**

Dalam hal pengembangan industri pariwisata mengutip apa yang disampaikan Freddy (2014) Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Baik tujuan tersebut untuk tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Selain itu, Analisis SWOT juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi suatu gambaran) tentang sebuah perusahaan atau organisasi. Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai sebagai faktor yang di jadikan masukan. Dan kemudian masukan tersebut dikelompokkan sesuai kontribusinya masing-masing.

Analisis SWOT merupakan salah satu metode mengembangkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, poyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar yaitu strength, weakness, opportunities dan threats, metode ini paling sering di gunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan di lakukan analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan hanya memecahkan masalah (freddy, 2014)

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor yaitu:

a. Kekuatan (*Strength*)

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada, kekuatan yang di analisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek konsep bisni situ sendiri, yaitu kekuatan apa saja yang dimiliki pariwisata, dengan mengetahui kekuatan, pariwisata dapat di kembangkan menjadi lebih tangguh hingga mampu bertahan dalam pasara dan mampu bersain untuk perkembangan selanjunya yang menyangkut pariwisata

b. Kelemahan (*Weakness*)

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat adalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada, kelemahan yang di analisis, merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, yaitu segala faktor yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi pengembangan objek wisata .

c. Peluang (*Opportunities*)

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi, kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis, itu sendiri minsalnya kompetitor, kebijakan.

d. Ancaman (Threats)

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri

Analisis SWOT di lakukan dengan maksud mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang di lakukan untuk mencapai sasaran yang telah di tetapkan. Oleh karena tingkat kesiapan fungsi di tentukan oleh tinggkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan pada keseluruhan faktor dala setiap fungsi tersebut, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal. Untuk tingkat kesiapan yang memadai, artinya: minimal memenuhi ukuran kesiapan yang di perlukan untuk pencapai sasaran, di nyatakan sebagai kekuatan bagi faktor yang tergolong internal dan peluang bagi faktor yang tergolong eksternal, sedangkan tinggkat kesepian yang kurang memadai, artinya tidak memenuhi ukuran ukuran kesepian, di nyatakan sebagai ukurn kelemahan bagi faktor yang tergolong internal atau ancaman bagi faktor yang tergolong eksternal.

Model pengembangan industri pariwisata adalah layaknya sebuah bangunan yang akan menguatkan ekonomi Indonesia, dengan landasan, pilar dan atap sebagai elemen-elemen bangunan tersebut. Yang perlu digaris bawahi sejak awal adalah adanya kenyataan bahwa banyak subsektor industri pariwisata di Indonesia yang memiliki pertumbuhan dibandingkan yang sektor lebih industri tinggi nasional lainnya, dan itu

dicapai dengan intervensi pemerintah yang minimal. Saat ini upaya pemerintah dalam rangka membangun industri kreatif diharapkan lebih meningkatkan kemampuan inovasi dan daya adaptasi yang selama ini telah terbangun secara alami, bukan justru sebaliknya. Dengan model pengembangan industri pariwisata ini, maka akan membawa industri pariwisata ke arah yang lebih baik menuju tercapainya visi dan misi kepariwisataan itu sendiri.

Model pengembangan ekonomi terdapat 5 pilar yang perlu terus diperkuat sehingga industri pariwisata dapat tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi kepariwisataan itu sendiri. Kelima pilar ekonomi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) *Industry*. Industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran serta konsumsi produk atau jasa dari sebuah negara atau area tertentu. Industri yang menjadi perhatian dalam pilar ini khususnya adalah industri pariwisata yang akan dianalisis berdasarkan model Porter 5-forces. Analisis dengan Porter 5-forces sebagai framework ini dilakukan untuk mengupayakan terbentuknya struktur pasar industri pariwisata dengan persaingan sempurna yang mempermudah pelaku industri pariwisata untuk melakukan bisnis dalam sektor tersebut.
- 2) *Technology*. Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas baik material dan non material, yang merupakan aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu. Dengan kata

lain, teknologi bukan hanya mesin ataupun alat bantu yang sifatnya berwujud, tetapi teknologi ini termasuk kumpulan teknik atau metode-metode, atau aktivitas yang membentuk dan mengubah budaya. 16 Teknologi ini akan merupakan enabler untuk mewujudkan kreativitas individu dalam karya nyata. Richard Florida (Florida, 2014) mengatakan ada tiga modul utama membangun ekonomi yaitu (1) Talenta Sumber daya insani, (2) Teknologi, (3) dan Toleransi Sosial. Teknologi dimasukkan kedalam pilar karena fungsinya sebagai kendaraan dan perangkat (tools) bagi pengembangan landasan ilmu pengetahuan. Teknologi bisa dipakai dalam berkreasi, memproduksi, berkolaborasi, mencari informasi, distribusi dan sarana bersosialisasi.

- 3) *Resources*. Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah, selain ide atau kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani yang merupakan landasan dari industri pariwisata ini. Sumber daya meliputi sumber daya alam maupun ketersediaan lahan yang menjadi input penunjang dalam industri kreatif. Sumber daya material yang khas Indonesia seperti misalnya rotan adalah salah satu keunikan dari bangsa Indonesia. Intensifikasi sumber daya-sumber daya yang khas ini kedalam produk-produk fisik seperti desain, kerajinan dan fesyen memberikan identitas nasional yang dibutuhkan dalam berkompetisi dipasar global. Era ekonomi ini juga mendapatkan warisan dampak buruk dari era industrialisasi. Pemanasan global di seluruh dunia

membangkitkan kesadaran kolektif dari warga dunia dan menghasilkan konsensus politis mengenai penyelamatan bumi, yang diwujudkan dalam bentuk perdagangan karbon (carbon market). Sehingga, dalam membangun industri pariwisata berbasis produk fisik, harus juga disertai dengan pola pikir ramah lingkungan. Pertumbuhan perdagangan karbon ini sangat pesat dan peranan negara-negara Asia sebagai produsen sangat strategis. Selayaknya peluang ini dimanfaatkan juga oleh industri-industri pariwisata.

- 4) *Institution*. Institution dalam pilar pengembangan industri pariwisata dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial dimana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, aturan, serta hukum yang berlaku. Tatanan sosial ini bisa yang bersifat informal –seperti sistem nilai, adat istiadat, atau norma - maupun formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Industri kreatif memajukan ide-ide yang dapat dieksploitasi menjadi potensi ekonomi. Dengan demikian peranan hukum dalam memproteksi ide-ide sangat penting. Proteksi ide-ide dijalankan dengan mekanisme HKI. Namun, harus ditekankan bahwa HKI bukan poin utama dari industri kreatif, yang lebih penting adalah bagaimana insan Indonesia menggunakan proses kreatif di dalam kehidupan sehari-hari, baik secara keilmuan, industri maupun komersial. Oleh karena itu, pendaftaran HKI pada produk ada proporsi-proporsi tertentu. Regim HKI yang sekarang populer masih bernuansa kebarat-baratan yang sangat individualis. Sebisa mungkin

industri kreatif di Indonesia juga mampu membangun landasan HKI yang bersifat ketimuran yang kuat, karena HKI didunia timur banyak berupa nilai-nilai kearifan budaya lokal yang bersifat kebersamaan (togetherness) dan berbagi (sharing).

- 5) *Financial Intermediary*. Lembaga intermediasi keuangan adalah lembaga yang berperan menyalurkan pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal/ekuitas maupun pinjaman/kredit. Lembaga intermediasi keuangan merupakan salah satu elemen penting untuk untuk menjembatani kebutuhan keuangan bagi pelaku dalam industri kreatif.

Industri pariwisata memiliki subsektor yang banyak. Ada yang kreasinya berbentuk benda fisik, ada pula yang kreasinya berupa produk non-fisik (intangible). Persepsi lembaga keuangan saat ini masih tradisional, hanya mau menyalurkan pinjaman pada industri yang memiliki hasil fisik dan memiliki lahan fisik sebagai tempat berproduksi. Dengan berkembangnya teknologi ICT, saat ini banyak produk-produk non-fisikal yang memanfaatkan dunia maya (cyberspace) sehingga berbentuk digital. Insititusi finansial harus menciptakan perangkat finansial yang mendukung era ini.

Dari sudut ekonomi bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung. Adanya pariwisata juga akan

menumbuhkan usaha-usaha ekonomi yang saling merangkai dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pariwisata juga merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu. Alasannya karena aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan kerja, relaksasi, berbelanja, bisnis, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu etnik tertentu, kesehatan dan pariwisata spiritualisme.

## **B. Tinjauan Empris**

Sepanjang penulisan penulis mengenai tema ini, belum, ditemukan penelitian secara khusus mengungkapkan dan meneliti proses peran dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengembangkan industri pariwisata. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang mendekati makna dari tema yang dipilih yaitu Peran Pemuda dalam Pengembangan Pelayanan Publik, Mufiddin Niah (2017) yang membahas peran partisipasi pemuda dalam pembangunan serta dampaknya terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya kontrol profesional serta tidak produktifnya pemerintah. Dampak peran pemuda dalam pelayanan publik diantaranya dampak kelembagaan, dampak administrasi dan dampak profesional. Sementara penelitian yang dilakukan Adhyaksa Dault (2007) yang berjudul Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dilakukan dengan

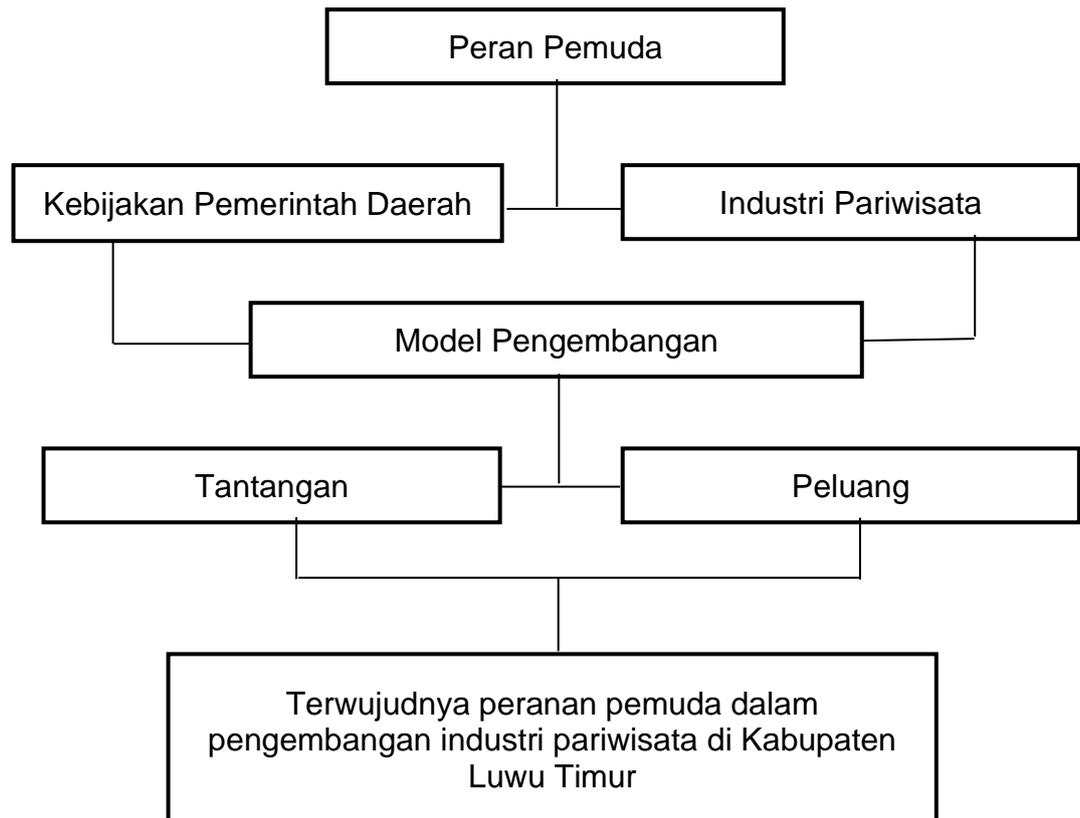
menggunakan persamaan structural. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang mempengaruhi peran pemuda dalam pembangunan adalah kebijakan public, kewirausahaan pemuda, penilikan kapitalis social dan penguasaan sumber daya. Kebijakan public bias efektif jika didukung dengan kebijakan yang terkait dengan faktor faktor lainnya secara simultan.

Sedangkan Puspa dan Siti Czafrani (Rini & Czafrani, 2010), melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal oleh pemuda dalam rangka menjawab tantangan ekonomi global. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang memadukan analisis data dengan aspek aspek yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif sangat diperlukan yakni perekonomian kreatif yang menjual keanekaragaman budaya Indonesia, dengan pemuda sebagai aktor utamanya. Melalui hal tersebut, diharapkan para pemuda bias menghadapi tantangan globalisasi dengan tidak menghilangkan identitas sebagai pemuda Indonesia serta sukses dipasar bebas.

Oleh karena itu tulisan ini hadir untuk menyajikan peran pemuda dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan industri pariwisata. Lebih jauh, penulis mendeskripsikan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemuda dalam mengembangkan sektor industri pariwisata.

### C. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang diajukan, terlebih dahulu penulis mengidentifikasi dan mengemukakan kata-kata kunci dalam judul penelitian in i:

### 1) Peran

Peran atau perananan bisa diartikan sebagai tindakan atau kegiatan atau fungsi yang diberikan atau diharapkan dari seseorang atau kelompok. Peran juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh seseorang dalam lingkungan sosial tertentu (The free Dictionary, 2020). Peran yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan: peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan

### 2) Pemuda

Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1).

### 3) Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian asas dan konsep yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam suatu pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat

diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

#### 4) Industri Pariwisata

Dalam undang-undang Pariwisata No 20 Tahun 2009 tentang definisi industri pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Industri Pariwisata yang dimaksud adalah Sektor pemasaran (*The Marketing Sector*), Sektor perhubungan (*The Carrier Sector*), Sektor akomodasi (*The Accommodation Sector*), Sektor daya tarik/atraksi wisata (*The Attraction Sector*), Sektor tour operator (*The Tour Operator Sector*), Sektor pendukung/ rupa-rupa (*The Miscellaneous Sector*), Sektor pengkoordinasi/ regulator (*The Coordinating Sector*).